

2020



LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
ASERSI FINAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 April 2021


Airlangga Hartarto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
A.1. DASAR HUKUM	9
A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9
A.3. RENCANA STRATEGIS	12
A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	17
A.5. DASAR PENGUKURAN	18
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	18
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	29
B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	29
B.2. BELANJA NEGARA	31
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	32
B.2.2. BELANJA BARANG	33
B.2.3. BELANJA MODAL	35
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	35
C.1. ASET LANCAR	35
C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	36
C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	36
C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA	36
C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK	37
C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK	37

C.1.6.	BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI	37
C.1.7.	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI	37
C.1.8.	PERSEDIAAN	38
C.2.	ASET TETAP	38
C.2.1.	PERALATAN DAN MESIN	39
C.2.2.	GEDUNG DAN BANGUNAN	40
C.2.3.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	41
C.2.4.	ASET TETAP LAINNYA	41
C.2.5.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	41
C.3.	ASET LAINNYA	42
C.3.1.	ASET TAK BERWUJUD	42
C.3.2.	ASET LAIN-LAIN	43
C.3.3.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	44
C.4.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	44
C.4.1.	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	45
C.4.2.	UANG MUKA DARI KPPN	45
C.4.3.	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	45
C.5.	EKUITAS	45
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	46
D.1.	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	46
D.2.	BEBAN PEGAWAI	46
D.3.	BEBAN PERSEDIAAN	47
D.4.	BEBAN BARANG DAN JASA	47
D.5.	BEBAN PEMELIHARAAN	49
D.6.	BEBAN PERJALANAN DINAS	49
D.7.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	50
D.8.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	50
D.9.	KEGIATAN NON OPERASIONAL	51
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	53
E.1.	EKUITAS AWAL	53
E.2.	SURPLUS (DEFISIT) LO	53
E.3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	53

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS	53
E.4.1. SELISIH REVALUASI ASET	53
E.4.2. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	53
E.4.3. KOREKSI LAIN-LAIN	53
E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	54
E.6. EKUITAS AKHIR	54
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	55
F.1. REKENING PEMERINTAH	55
F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	55
F.2.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA	55
F.2.2. TRANSFER KELUAR	55
F.2.3. TRANSFER MASUK	56
F.2.4. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN	56
F.2.5. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI	56
LAMPIRAN PENDUKUNG	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	26
Tabel 4 Masa Manfaat Aset Tetap	27
Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	28
Tabel 6 Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2020	29
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020	30
Tabel 8 Perbandingan Rincian Realisasi PNPB 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	30
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2020	31
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020	31
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	32
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	33
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	34
Tabel 14 Belanja barang untuk Penanganan Pandemi Covid 19	34
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	35
Tabel 16 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	36
Tabel 17 Rincian Persediaan	38
Tabel 18 Rincian Aset Tetap	38
Tabel 19 Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin	39
Tabel 20 Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin	40
Tabel 21 Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin	40
Tabel 22 Rincian Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan	41
Tabel 23 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020	42
Tabel 24 Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2020	43
Tabel 25 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020	44
Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020	44
Tabel 27 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	45
Tabel 28 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	46
Tabel 29 Rincian Beban Pegawai	47
Tabel 30 Rincian Beban Persediaan	47
Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa	48

Tabel 32 Rincian Barang Jasa Penanganan Pandemi	49
Tabel 33 Rincian Beban Pemeliharaan	49
Tabel 34 Rincian Beban Perjalanan Dinas	50
Tabel 35 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
Tabel 36 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	51
Tabel 37 Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	51
Tabel 38 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP Atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian s.d 31 Desember 2020
Lampiran II	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran III	Laporan Pendukung



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 30 April 2021

Airlangga Hartarto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT**

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 30 April 2021
Inspektur,



Miza S Mashudi
NIP. 197001181996031001

EXECUTIVE SUMMARY

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disesuaikan dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp264.677.956,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp406.114.336.588,00 atau sebesar 96,44% dari alokasi anggaran sebesar Rp421.095.548.000,00.

Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Negara dan Hibah	-	264.677.956		-	973.148.509	-
2	Belanja Negara	421.095.548.000	406.114.336.588	96,44%	433.710.862.000	427.700.998.822	98,61%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per tanggal pelaporan. Nilai Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.462.407.317,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp748.721.003,00, Aset Tetap sebesar Rp21.875.723.741,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp3.837.962.573,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp5.102.000.765,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Adapun jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp21.360.406.552,00.

Ringkasan perbandingan Neraca per 31 Desember 2020 dengan Neraca 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-20	31-Dec-19	Rp	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar	748.721.003	820.526.839	(71.805.836)	(8,75%)
Aset Tetap	21.875.723.741	44.254.115.525	(22.378.391.784)	(50,57%)
Piutang Jangka Panjang				
Aset Lainnya	3.837.962.573	4.665.000.744	(827.038.171)	(17,73%)
Jumlah Aset	26.462.407.317	49.739.643.108	(23.277.235.791)	(46,80%)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	5.102.000.765	4.834.675.558	267.325.207	5,53%
Ekuitas Dana			0	
Ekuitas	21.360.406.552	44.904.967.550	(23.544.560.998)	(52,43%)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	26.462.407.317	49.739.643.108	(23.277.235.791)	(46,80%)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp299.900,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp544.889.688.008,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp544.889.388.108,00. Terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp198.769.167,00. Sedangkan untuk Pos-Pos Luar Biasa bersaldo nihil, sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp544.690.618.941,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp44.904.967.550,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp544.690.618.941,00, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp521.146.057.943,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp21.360.406.552,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per tanggal 31 Desember 2020, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Kemenko Perekonomian juga mengungkapkan pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, dan beban terkait penanganan pandemi COVID-19 dalam CaLK untuk memberikan informasi yang lebih detail bagi pengguna laporan keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-20		% thd Angg	31-Dec-19
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1		264.677.956	-	973.148.509
JUMLAH PENDAPATAN			264.677.956	-	973.148.509
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	98.009.048.000	97.072.256.965	99,04%	104.020.300.613
Belanja Barang	B.2.2	309.169.926.000	295.345.903.008	95,53%	314.636.547.474
Belanja Modal	B.2.3	13.916.574.000	13.696.176.615	98,42%	9.044.150.735
JUMLAH BELANJA		421.095.548.000	406.114.336.588	96,44%	427.700.998.822

- Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp406.114.336.588,00 atau sebesar 96,44% dari total pagu anggaran setelah dikurangi pengembalian belanja.
- Sedangkan realisasi belanja pada 31 Desember 2019 adalah Rp427.700.998.822,00, atau sebesar 98,61% dari pagu anggaran Rp433.710.862.000,00.

Jakarta, 30 April 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,


Airlangga Hartarto

II. NERACA

NERACA
PER 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-20	31-Dec-19
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	149.980.723
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	78.359.727	93.422.527
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	35.646.813	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	558.674	138.642.677
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.5	(2.793)	(693.212)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan			
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	46.000.000	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR	C.1.7	(230.000)	-
Persediaan	C.1.8	588.388.582	439.174.124
Persediaan yang Belum Diregister		-	
JUMLAH ASET LANCAR		748.721.003	820.526.839
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	78.465.371.778	73.866.781.172
Gedung dan Bangunan	C.2.2		29.541.154.075
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3	2.078.674.827	
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	842.598.787	464.570.712
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(59.510.921.651)	(59.618.390.434)
JUMLAH ASET TETAP		21.875.723.741	44.254.115.525
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	17.050.923.442	15.106.143.042
Aset Lain-Lain	C.3.2	9.646.100.004	513.326.510
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(22.859.060.873)	(10.954.468.808)
JUMLAH ASET LAINNYA		3.837.962.573	4.665.000.744
JUMLAH ASET		26.462.407.317	49.739.643.108
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	5.099.815.438	4.606.249.808
Uang Muka dari KPPN	C.5.2		149.980.723
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.3	2.185.327	78.445.027
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.102.000.765	4.834.675.558
EKUITAS	C.6		
Ekuitas	C.6	21.360.406.552	44.904.967.550
JUMLAH EKUITAS		21.360.406.552	44.904.967.550
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		26.462.407.317	49.739.643.108

Jakarta, 30 April 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Airlangga Hartarto

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-20	31-Dec-19
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	299.900	158.324.460
JUMLAH PENDAPATAN		299.900	158.324.460
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	97.588.418.163	104.413.513.563
Beban Persediaan	D.3	5.274.974.005	4.831.332.513
Beban Barang dan Jasa	D.4	335.984.893.432	491.348.336.815
Beban Pemeliharaan	D.5	17.887.163.923	13.644.270.039
Beban Perjalanan Dinas	D.6	77.380.028.857	111.766.324.555
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7		4.485.159.717
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	10.774.670.047	11.088.933.831
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(460.419)	(227.872)
Beban Lain-Lain			
JUMLAH BEBAN		544.889.688.008	741.577.643.161
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(544.889.388.108)	(741.419.318.701)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		114.751.527	(17.640.210)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		84.017.640	76.726.915
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		198.769.167	59.086.705
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(544.690.618.941)	(741.360.231.996)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT LO		(544.690.618.941)	(741.360.231.996)



Jakarta, 30 April 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Airlangga Hartarto

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-20	31-Dec-19	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	44.904.967.550	40.030.783.559	4.874.183.991	12,176
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(544.690.618.941)	(741.360.231.996)	196.669.613.055	(26,528)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	8.252.179.498	(8.252.179.498)	(100,000)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-	-	-
Sellsh Revaluasi Aset Tetap	E.4.1	-	10.155.373.653	(10.155.373.653)	100
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.2	-	(1.903.194.155)	1.903.194.155	100
Koreksi Lain-Lain	E.4.3	-	-	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	521.146.057.943	737.982.236.489	(216.836.178.546)	(29,382)
KENAIKAN PENURUAN EKUITAS		(23.544.560.998)	4.874.183.991	(28.418.744.989)	(583,046)
EKUITAS AKHIR	E.6	21.360.406.552	44.904.967.550	(23.544.560.998)	(52,432)

Jakarta, 30 April 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Airlangga Hartarto

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.5/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Profil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan

Industri (EKUIN). Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Pada tahun 2019 terdapat pergantian kabinet yang baru dan menyebabkan perubahan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat. Proses penataan organisasi pun dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menyesuaikan rekomendasi restrukturisasi organisasi, berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatur peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

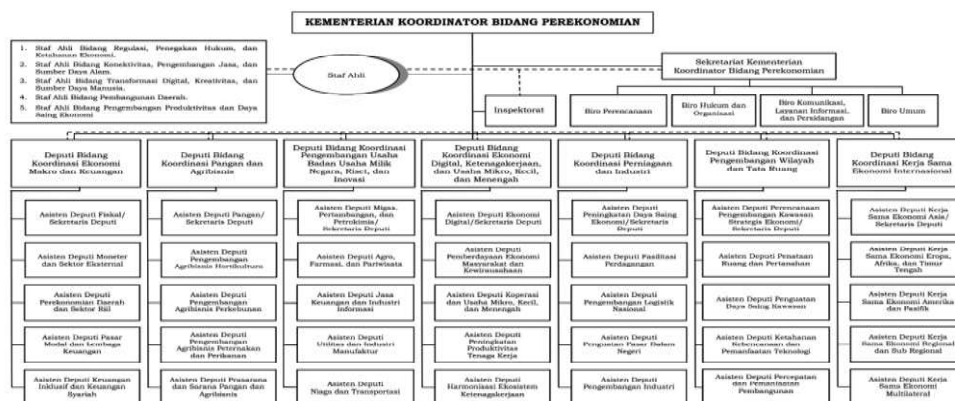
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 sesuai hal tersebut di atas, maka diperlukan turunan peraturan dimaksud untuk mengatur kelembagaan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini terwujud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan tanggal 29 Juni 2020. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;

- i. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam;
- k. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia;
- l. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi; dan
- n. Inspektorat.

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.3. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2020-2024 adalah **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut.

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Pembangunan ekonomi dalam mewujudkan visi-misi Presiden diharapkan dapat diselenggarakan melalui perluasan kesempatan dan

akses pada seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan serta peningkatan produktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan kesinambungan antar generasi. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2020 - 2024.

Visi Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden-Wakil Presiden yang meliputi:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**
- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga**
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan**

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke 1, 2, 3, dan 4, sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:

- 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;**
- 2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;**
- 3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan**
- 4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.**

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dicapai melalui Misi/Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Kementerian Teknis di bidang perekonomian dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan daya saing ekonomi.

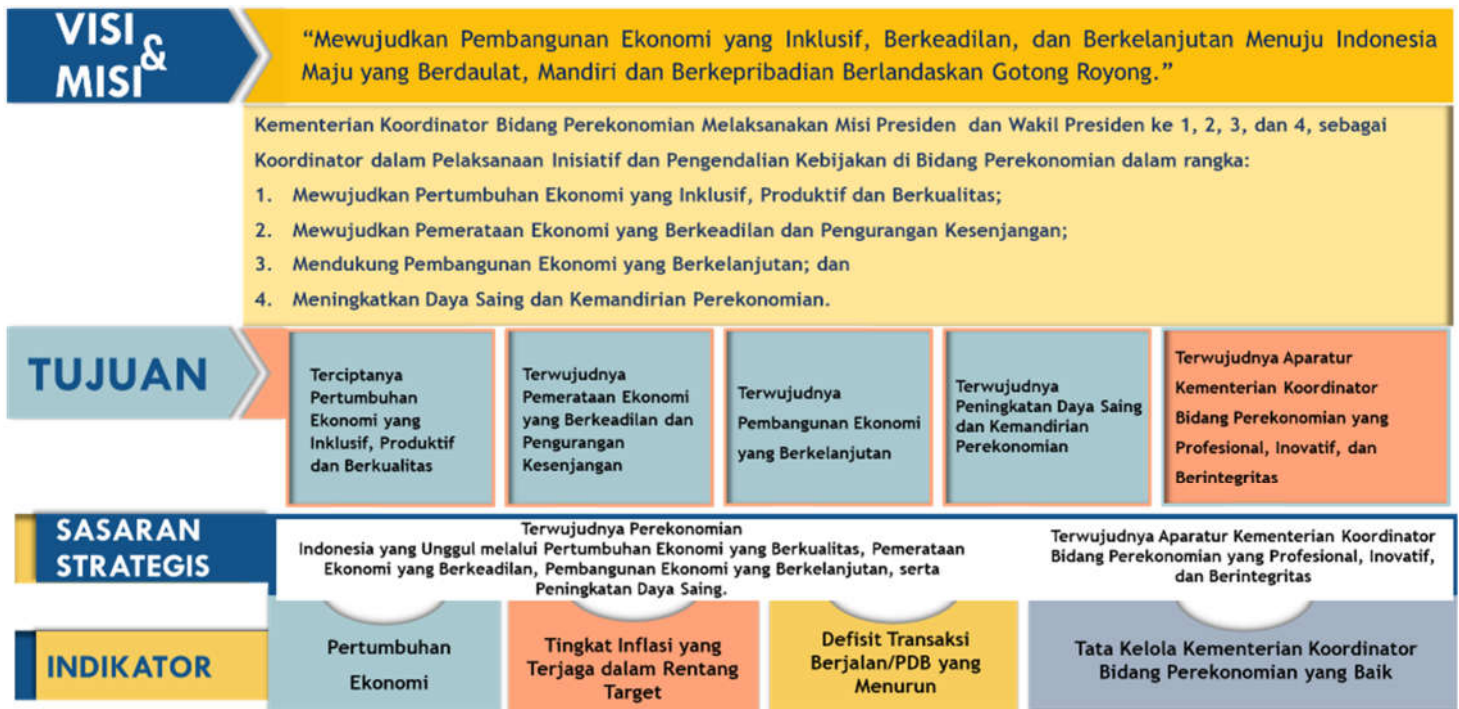
Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian;
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dari visi, misi, dan tujuan diatas terdapat kondisi yang ingin dicapai oleh
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diantaranya:

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	Pertumbuhan Ekonomi
2.	Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan		Tingkat Inflasi yang Terjaga dalam Rentang Target
3.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan		Defisit Transaksi Berjalan/PDB yang Menurun
4.	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian		
5.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

Selama periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Program	Kegiatan	Output	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Penyerapan Anggaran	Target Volume Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Persentase Realisasi Volume Keluaran
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	2494. Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional	001. Strategi Kebijakan EODB dan Peningkatan Daya Saing Nasional (Paket Rekomendasi Kebijakan)	5,000,000,000	4,887,768,384	97.76 %	1.00	1.00	100.00 %
	2518. Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	004. Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Terkait Keuangan Inklusif (Paket Rekomendasi)	3,500,000,000	3,475,517,712	99.3 %	1.00	1.00	100.00 %
	2522. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi	007. Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Paket Rekomendasi)	3,972,743,000	3,878,471,534	97.63 %	2.00	2.00	100.00 %
	4550. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	001. Rekomendasi Kebijakan Rancangan Regulasi Cipta Kerja (Paket Rekomendasi Kebijakan)	16,638,367,000	11,538,152,085	69.35 %	2.00	2.00	100.00 %
	5229. Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	003. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Paket Rekomendasi Kebijakan)	4,000,000,000	3,994,261,868	99.86 %	2.00	2.00	100.00 %

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Untuk periode pelaporan di tahun anggaran 2020, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan digunakan basis akuntansi akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, adapun untuk Laporan Realisasi Anggaran menggunakan akuntansi berbasis kas.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila

diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Aset Tetap

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data

pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai aset tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga

dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5 %
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10 %
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50 %
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100 %

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada PMK Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013, sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa

manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

(10) Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi barang milik negara berupa Aset Tak Berwujud adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Kebijakan amortisasi Aset Tak Berwujud didasarkan pada PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan terhadap Perangkat Lunak (*software*) komputer, Lisensi, Waralaba (*franchise*), Hak Cipta (*copyright*), dan Hak Paten.

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- Aset tak berwujud dalam kondisi usang/atau rusak berat, serta telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya; dan
- Aset tak berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah serta telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang, untuk dilakukan penghapusannya.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KMK.06/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, <i>Merk</i> , Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Kemenko Bidang Perekonomian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 11 kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp409.357.649.000,00 setelah revisi terakhir menjadi Rp421.095.548.000,00. Adanya *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam rangka penanganan COVID-19 yang mendorong seluruh K/L untuk menyisir kembali kegiatan-kegiatan dan/atau belanja yang tidak menjadi prioritas di masa pandemi menyebabkan anggaran Kemenko Bidang Perekonomian sempat turun menjadi Rp393.334.438.000,00. Namun dengan adanya program Publikasi dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Kemenko Perekonomian mendapatkan tambahan dana dari BA-BUN sehingga pagu anggaran menjadi Rp421.095.548.000,00. Berikut ini adalah perubahan revisi terkait dengan pagu anggaran Kemenko Bidang Perekonomian:

Tabel 6
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2020 (Dalam Rupiah)

Uraian	2020	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	116.009.048.000	98.009.048.000
Belanja Barang	286.036.001.000	309.169.926.000
Belanja Modal	7.312.600.000	13.916.574.000
Jumlah Belanja	409.357.649.000	421.095.548.000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp18.000.000.000,00, penambahan pagu belanja barang sebesar Rp23.133.925.000 dan penambahan belanja modal sebesar Rp6.603.974.000,00.

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp264.677.956,00, tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp264.677.956*

Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	130.101.089	-
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	7.725.000	-
3	Pendapatan Denda		299.900	
4	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu		126.551.967	
5	Pendapatan Anggaran lain-Lain	-		
Jumlah		-	264.677.956	-

Realisasi PNBP pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp706.946.303,00 atau turun sebesar 72,65% dibandingkan realisasi PNBP pada tahun 2019. Perbandingan realisasi PNBP disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
Perbandingan Rincian Realisasi PNBP
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Dec	31-Dec	Kenaikan (Penurunan)	
		TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	130.101.089	11.505.555	118.595.534	1030,77%
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	7.725.000		7.725.000	100%
3	Pendapatan Denda	299.900	158.324.460	(158.024.560)	(100%)
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.452.990	9.750.000	(5.297.010)	(54%)
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	122.098.977	792.044.244	(669.945.267)	(85%)
6	Pendapatan Anggaran Lain-Lain			-	
7	Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR		1.524.250	(1.524.250)	(100%)
Jumlah		264.677.956	973.148.509	(708.470.553)	(72,80%)

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN merupakan penerimaan atas penjualan 1 paket barang inventaris sesuai risalah lelang Nomor 47/25/2020 tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp42.100.090,00
- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN merupakan penerimaan atas penjualan 1 paket barang inventaris/peralatan dan mesin kantor sesuai risalah lelang Nomor 441/25/2020 tanggal 25 November 2020 sebesar Rp88.000.999,00

- c. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atas kehilangan barang milik negara berupa sepeda motor sebesar Rp7.725.000
- d. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp299.900
- e. Penerimaan kembali belanja barang TAYL terdiri atas temuan APIP, honor tim, jasa konsultan, perjadi, konsinyering, RDK sebesar Rp122.098.977,00.
- f. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL atas pengembalian kelebihan tunjangan kinerja pegawai tahun 2019 sebesar Rp4.452.990,00.

B.2.BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja
Negara
Rp406.114.336.588

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp406.114.336.588,00 atau mencapai 96,44% dari alokasi anggaran sebesar Rp421.095.548.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja dari transaksi kas, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp649.075.666,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2020 berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2020 (Dalam Rupiah)

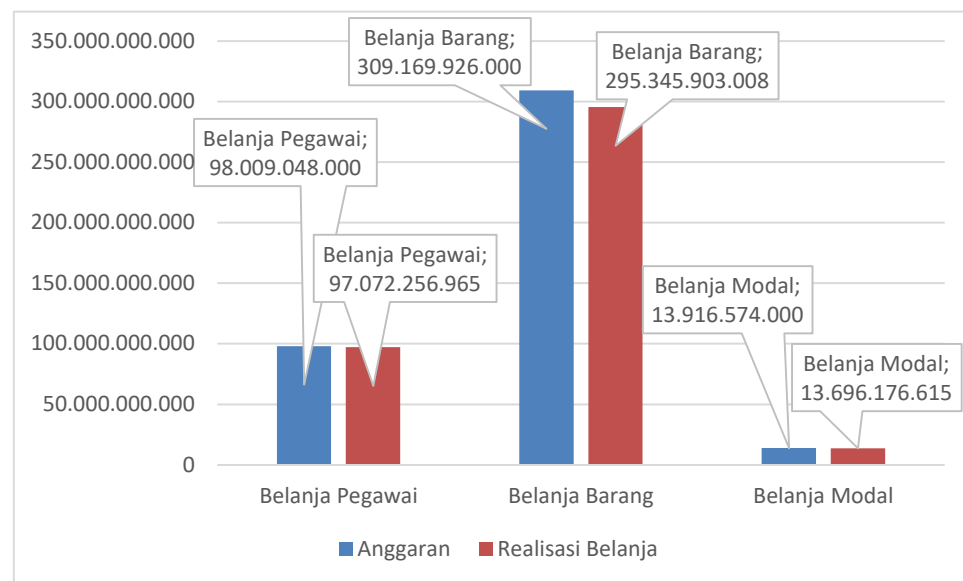
Kode Program	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Belanja Netto	(%)	Pengembalian Belanja
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	219.670.026.000	213.249.647.297	97,08%	70.157.506
6	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	201.425.522.000	192.864.689.291	95,75%	578.918.160
Jumlah		421.095.548.000	406.114.336.588	96,44%	649.075.666

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2020, seluruhnya bersumber dari dana Rupiah Murni sebesar Rp406.114.336.588,00. Berdasarkan jenis belanja, rincian anggaran dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 (Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	%
51	Belanja Pegawai	98.009.048.000	97.072.256.965	936.791.035	99,04%
52	Belanja Barang	309.169.926.000	295.345.903.008	13.824.022.992	95,53%
53	Belanja Modal	13.916.574.000	13.696.176.615	220.397.385	98,42%
Jumlah Belanja		421.095.548.000	406.114.336.588	14.981.211.412	96,44%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja periode Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Persentase realisasi atas jenis belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2020 paling tinggi adalah belanja Pegawai yakni 99,04% atau sebesar Rp97.072.256.965,00 dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp98.009.048.000,00. Adapun untuk belanja barang terealisasi senilai 95,53% atau sebesar Rp295.345.903.008,00, sedangkan belanja modal sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasi 98,42% atau sebesar Rp13.696.176.615,00.

Perbandingan realisasi belanja pada periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)	
		31-Dec TA 2020	31-Dec TA 2019
51	Belanja Pegawai	97.072.256.965	104.020.300.613
52	Belanja Barang	295.345.903.008	314.636.547.474
52	Belanja Modal	13.696.176.615	9.044.150.735
Jumlah		406.114.336.588	427.700.998.822

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai
Rp97.072.256.96
5

Pada periode anggaran sampai dengan 31 Desember 2020, pagu Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 99,04% atau sebesar Rp97.072.256.965,00 dari pagu sebesar Rp98.009.048.000,00. Nominal pagu dan realisasi terbesar

pada Belanja Pegawai adalah kelompok belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai, yang terealisasi sebesar 99,31% dari total pagu kelompok belanja dimaksud.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019, dengan capaian masing-masing sebesar Rp98.009.048.000,00 dan Rp104.020.300.613,00 atau turun sebesar 6,68%. Realisasi belanja pegawai mengalami penurunan dikarenakan pembayaran komponen THR pada tahun 2020 hanya terdiri dari gaji pokok saja tanpa tunjangan kinerja. Adapun Pengembalian Belanja Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp52.519.406,00 dan Rp35.747.774,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Dalam Rupiah)

Kelompok Belanja	Uraian	31-Des-20			Realisasi 31 Desember	Perbandingan Realisasi	
		Pagu	Realisasi	%	Tahun 2019	Naik (turun)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	36.155.273.000	35.710.603.376	98,77%	34.259.357.108	1.451.246.268	4,24%
5115	Belanja Gaji dan Tunj Pegawai Non PNS	227.500.000	227.500.000	100,00%	105.000.000	122.500.000	
5122	Belanja Lembur	130.000.000	113.520.000	87,32%	204.235.000	(90.715.000)	(44,42%)
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	61.496.275.000	61.073.152.995	99,31%	69.487.456.279	(8.414.303.284)	(12,11%)
Pengembalian Belanja Pegawai			(52.519.406)		(35.747.774)	(16.771.632)	46,92%
Jumlah Kelompok Belanja Pegawai		98.009.048.000	97.072.256.965	99,04%	104.020.300.613	(6.948.043.648)	(6,68%)

B.2.2. BELANJA BARANG

*Realisasi Belanja
Barang
Rp295.345.903.008*

Pada periode Tahun 2020, pagu Belanja Barang telah terealisasi sebesar 95,53% atau sebesar Rp295.345.903.008,00 dari pagu sebesar Rp309.169.926.000,00.

Persentase realisasi terbesar pada Belanja Barang terdapat pada kelompok akun Belanja Jasa sebesar Rp159.033.112.703,00 atau 97,85% dari total pagu kelompok akun Belanja Jasa sebesar Rp162.530.329.000,00. Persentase realisasi terbesar kedua Belanja Barang merupakan kelompok akun Belanja pemeliharaan yang terealisasi sebesar 96,15% atau sebesar Rp18.060.826.660,00 dari pagu sebesar Rp18.784.214.000,00.

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 jika dibandingkan 31 Desember 2019, dengan capaian realisasi masing-masing adalah sebesar Rp295.345.903.008,00 dan Rp314.636.547.474,00. Perbandingan persentase

penurunan realisasi yang paling besar terdapat pada belanja perjalanan luar negeri yakni 83,43% atau sebesar Rp13.414.528.037,00.

Adapun Pengembalian Belanja Barang pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp596.556.260,00 dan Rp618.139.017,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-20			Realisasi 31 Des 2019	Perbandingan Realisasi	
		Pagu	Realisasi	%		Naik (turun)	%
5211	Belanja Barang Operasional	12.443.730.000	11.177.657.070	92,04%	9.829.280.591	1348.376.479	13,72%
5212	Belanja Barang Non Operasional	25.554.970.000	23.967.101.442	93,79%	43.334.054.019	(19.366.952.577)	(44,69%)
5213	Belanja Barang Persediaan	6.279.484.000	5.710.984.376	90,95%	4.858.931.525	852.052.851	17,54%
5221	Belanja Jasa	162.530.329.000	159.033.112.703	97,85%	131.654.615.804	27.378.496.899	20,80%
5231	Belanja Pemeliharaan	18.784.214.000	18.060.826.660	96,15%	13.220.057.315	4.840.769.345	36,62%
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	81.080.999.000	75.327.641.631	92,90%	96.278.083.814	(20.950.442.183)	(21,76%)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.796.200.000	2.665.135.386	95,31%	16.079.663.423	(13.414.528.037)	(83,43%)
Pengembalian Belanja			(596.556.260)		(618.139.017)	21582.757	(3,49%)
Jumlah Kelompok		309.169.926.000	295.345.903.008	95,53%	314.636.547.474	(19.290.644.466)	(6,13%)

Kemenko Bidang Perekonomian mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp10.090.033.000,00. Anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2020 terserap sebesar Rp9.208.346.201,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja barang untuk Penanganan Pandemi Covid 19

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	2.011.868.000	1.745.336.109	86,75%
	Biaya Komunikasi, pengadaan masker/hand sanitizer, lisensi aplikasi video conference			
521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	3.840.757.000	3.726.673.852	97,03%
	Biaya Konsumsi WFO, uang saku RDK WFO, Pengadaan APD			
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi Covid 19	1.462.287.000	1.199.770.988	82,05%
	Pengadaan Masker/Hand Sanitizer/APD/Rapid Test sebagai persediaan			
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	2.775.121.000	2.536.565.252	91,40%
	Jasa Penanganan Covid-19 dan Honor Narasumber melalui video conference			
Jumlah Belanja		10.090.033.000	9.208.346.201	91,26%

B.2.3. BELANJA MODAL

*Realisasi Belanja
Modal
Rp13.696.176.615*

Pada periode tahun 2020, pagu Belanja Modal telah terealisasi sebesar 98,42% atau sebesar Rp13.696.176.615,00 dari pagu sebesar Rp13.916.574.000,00. Nominal pagu terbesar pada Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.930.898.000,00, kemudian diikuti Belanja Modal Lainnya sebesar Rp1.985.676.000,00 yang digunakan untuk perolehan Aset Tak Berwujud dalam bentuk perangkat lunak komputer (*software*) dan lisensi dan belanja penambahan nilai Aset Tetap Lainnya. Capaian nominal terbesar realisasi Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Peralatan Mesin, yang terealisasi sebesar Rp11.713.396.215,00 atau 98,18%. Sedangkan untuk belanja modal lainnya terealisasi sebesar Rp1.982.780.400,00 atau 99,85%. Perbandingan realisasi belanja modal pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019, masing-masing sebesar Rp13.696.176.615,00 dan Rp9.044.150.735,00. Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-20 Pagu	Realisasi	%	Realisasi 31 Des Tahun 2019	Perbandingan Realisasi	
						Naik (turun)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11930.898.000	11713.396.215	98,18%	7.134.500.735	4.578.895.480	64,18%
5361	Belanja Modal Lainnya	1985.676.000	1982.780.400 (Dalam Rupiah)	99,85%	1909.650.000	73.130.400	3,83%
Pengembalian Belanja Modal		-	-				
Jumlah Belanja Modal		13.916.574.000	13.696.176.615	98,42%	9.044.150.735	4.652.025.880	51,44%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1.ASET LANCAR

*Aset Lancar
Rp748.721.003*

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp748.721.003,00 dan Rp820.526.839,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Dalam Rupiah)

No	Aset Lancar	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	149.980.723
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	78.359.727	93.422.527
3	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	35.646.813	-
4	Piutang Bukan Pajak	558.674	138.642.677
5	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(2.793)	(693.212)
6	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	46.000.000	-
7	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar TP-TGR	(230.000)	-
8	Persediaan	588.388.582	439.174.124
9	Persediaan Belum Diregister	-	-
Jumlah		748.721.003	820.526.839

C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 bersaldo sebesar Rp0, adapun saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp149.980.723. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) per 31 Desember 2020 yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp78.359.727*

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 bersaldo Rp78.359.727,00 dan Rp93.422.527,00. Kas lainnya setara kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, antara lain penerimaan uang pengembalian belanja dan penerimaan uang potongan pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

*Belanja Dibayar
Dimuka
Rp35.646.813*

C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp35.646.813,00 dan Rp0 yang merupakan manfaat yang sisa manfaatnya melampaui tanggal pelaporan. Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 merupakan belanja atas langganan akun zoom yang sisa manfaatnya masih dapat digunakan melebihi tanggal pelaporan.

C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK

*Piutang Bukan
Pajak Rp558.674*

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp558.674,00 dan Rp138.642.677,00 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 merupakan piutang atas honorarium PPNPN.

C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Piutang
Bukan Pajak
(Rp2.793)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp2.793,00) dan (Rp693.212,00). Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar. Dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek sesuai dengan yang diatur di PMK Nomor 69/PMK/06/2014 menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

C.1.6. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp46.000.000*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp46.000.000,00 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2020 merupakan piutang atas TGR Non Bendahara.

C.1.7. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Bagian
Lancar Tagihan
TP/TGR
(Rp230.000)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp230.000,00) dan Rp0. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digolongkan dalam piutang

dengan kualitas lancar. Dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek sesuai dengan yang diatur di PMK Nomor 69/PMK/06/2014 menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

Persediaan

Rp588.388.582

C.1.8. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp588.388.582,00 dan Rp439.174.124,00. Persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Persediaan (Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Dec-20	31 Des 2019
1	Barang Konsumsi	345.222.870	353.962.160
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	69.889.694	70.584.190
3	Persediaan Lainnya	173.276.018	14.627.774
Jumlah		588.388.582	439.174.124

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 berdasarkan harga pembelian terakhir

C.2.ASET TETAP

Aset Tetap

Rp21.875.723.741

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp21.875.723.741,00 dan Rp44.254.115.525,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Aset Tetap (Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Dec-20	31 Des 19
1	Peralatan dan Mesin	78.465.371.778	73.866.781.172
2	Gedung dan Bangunan	-	29.541.154.075
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.078.674.827	
4	Aset Tetap Lainnya	842.598.787	464.570.712
Total Nilai Perolehan		81.386.645.392	103.872.505.959
Akumulasi Penyusutan		(59.510.921.651)	(59.618.390.434)
Jumlah		21.875.723.741	44.254.115.525

C.2.1. PERALATAN DAN MESIN

*Peralatan dan
Mesin
Rp78.465.371.778*

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp78.465.371.778,00 dan Rp73.866.781.172,00. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin terdiri atas realisasi belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp11.713.396.215,00. Kemudian terdapat mutasi tambah peralatan mesin berupa reklas dari belanja pemeliharaan atas pembelian belanja modal yang masuk ke dalam belanja pemeliharaan sebesar Rp185.900.000,00 dan transfer masuk peralatan dan mesin dari Kementerian Keuangan sebesar Rp4.210.729.794,00. Mutasi kurang peralatan dan mesin berupa transfer keluar ke mahkamah konstitusi sebesar Rp1.944.516.584,00, beban aset ekstrakomptabel sebesar Rp14.513.000,00, Reklas ke Aset Tetap Lainnya atas pembelian wayang dan lukisan sebesar Rp49.500.000,00, Reklas Aset Tidak Digunakan sebesar Rp9.443.225.319,00 dan Reklas ke belanja pemeliharaan sebesar Rp59.680.500,00. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp58.88.273.850,00 sehingga nilai buku peralatan dan mesin adalah sebesar Rp19.597.097.928,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin (Dalam Rupiah)

Uraian Transaksi	Saldo	
Nilai Peroleh per 31 Desember 2019		73.866.781.172
Mutasi Tambah		
Realisasi Belanja	11.713.396.215	
Reklas dari belanja pemeliharaan	185.900.000	
Transfer Masuk	4.210.729.794	
Beban Aset Ekstrakomptabel	(14.513.000)	
Reklas ke aset tetap lainnya	(49.500.000)	
Reklas ke Belanja Pemeliharaan	(59.680.500)	
Total Mutasi Tambah	15.986.332.509	
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	1.944.516.584	
Reklas Aset Tidak Digunakan	9.443.225.319	
Total Mutasi Kurang	11.387.741.903	
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020		78.465.371.778
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2020		58.868.273.850
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020		19.597.097.928

Transaksi penambahan dan pengurangan pada Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 20
Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin (Dalam Rupiah)

No	Kode Barang	Jumlah Unit	Rupiah Aset
301	Alat Bantu	3	584.190.484
302	Alat Angkutan Darat	43	7.094.528.740
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	869	2.926.955.205
306	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	30	186.775.005
308	Alat Laboratorium		
310	Alat Komputer	63	595.292.469
Total		1.008	11.387.741.903

Tabel 21
Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin (Dalam Rupiah)

Kelompok BMN	Mutasi Peralatan dan Mesin	Kuantitas	Nilai
A. Saldo Transaksi Pembelian dan Transfer Masuk			
301	Alat Bantu	12	1.299.095.304
302	Alat Angkutan		
303	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	1.001.000
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	433	8.268.177.057
306	Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	96	1.976.030.898
307	Alat Kedokteran dan Kesehatan	14	139.498.750
308	Alat Laboratorium		-
309	Alat Khusus Kepolisian		-
310	Komputer	108	4.277.249.500
315	Alat Deteksi & SAR	2	25.280.000
Total Saldo Pembelian dan Transfer Masuk		666	15.986.332.509
B. Transaksi Pengembangan Nilai Aset			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset			-
C. Transaksi Pengembangan Melalui KDP			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset			-
Mutasi Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2020		666	15.986.332.509

C.2.2. GEDUNG DAN BANGUNAN

*Gedung dan
Bangunan Rp0*

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp29.541.154.075,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan (Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Per Desember 2019	29.541.154.075
Transfer Keluar	(29.541.154.075)
Revaluasi Aset	
Koreksi atas LHIP Revaluasi	
Koreksi Pencatatan atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
Saldo Per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku 31 Desember 2020	-

Telah dilakukan proses serah terima Gedung dan Bangunan oleh Kemenko Bidang Perekonomian kepada Mahkamah Konstitusi sesuai BAST nomor: 1/SES.M.EKON/02/2020 tanggal 17 Februari 2020.

C.2.3. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.078.674.827

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.078.674.827,00 dan Rp0. Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu atas hasil transfer masuk dari Kementerian Keuangan berupa Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil.

C.2.4. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap lainnya
Rp842.598.787

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp842.598.787,00 dan Rp464.570.712,00. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa Aset Tetap Renovasi senilai Rp391.600.000,00, data gambar satelit atas program hibah JUTPI Phase II senilai Rp401.498.787,00, wayang senilai Rp20.570.000,00 dan lukisan senilai 28.930.000,00.

C.2.5. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp59.510.921.651

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp59.510.921.651,00 dan Rp59.618.390.434,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 23
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	78.465.371.778	58.868.273.850	19.597.097.928
2	Gedung dan Bangunan		0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.078.674.827	642.647.801	1.436.027.026
4	Aset Tetap Lainnya	842.598.787		842.598.787
Jumlah		81.386.645.392	59.510.921.651	21.875.723.741

C.3.ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp.3.837.962.57
3

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.837.962.573,00 dan Rp4.665.000.744,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Penurunan saldo aset lainnya di tahun 2020 dikarenakan adanya penghapusan aset tak berwujud yang tidak digunakan oleh pemerintah sesuai Keputusan Sesmenko Perekonomian Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 senilai Rp180.935.250,00, dan Keputusan Sesmenko Perekonomian Nomor 35 Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 senilai Rp177.288.000,00, reklasifikasi aset peralatan mesin yang sudah tidak digunakan hasil dari usulan jurnal koreksi BPK senilai Rp431.307.004,00 serta adanya penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan sebesar Rp9.447.297.881,00.

C.3.1. ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud
Rp17.050.923.442

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.050.923.442,00 dan Rp15.106.143.042,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2020 (Dalam Rupiah)

Jenis Transaksi Aset Tak Berwujud	Nilai
Saldo Awal	15.106.143.042
- <i>Software</i>	12.852.955.542
- Lisensi	2.253.187.500
Mutasi Tambah	
- Pembelian <i>Software</i> Komputer	1.982.780.400
- Hibah Masuk <i>Software</i>	
- Koreksi Antar Beban	
- Pembelian Lisensi	
- Pengembangan Nilai Aset <i>Software</i>	
- Pengembangan Melalui KDP <i>Software</i>	
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	
- <i>Software</i> Komputer	38.000.000
Saldo ATB Per 31 Desember 2020	17.050.923.442
- <i>Software</i>	14.797.735.942
- Lisensi	2.253.187.500

C.3.2. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain
Rp9.646.100.004

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.646.100.004,00 dan Rp513.326.510,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas aset tetap dan aset tak berwujud yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas, atau dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Kenaikan saldo aset lain-lain di tahun 2020 dikarenakan adanya Reklas Kendaraan dan Aset tidak digunakan sebesar Rp8.996.557.815,00. Terdapat penurunan atas saldo aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dikarenakan adanya penghapusan aset tak berwujud yang tidak digunakan oleh pemerintah sesuai Keputusan Sesmenko Perekonomian Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 senilai Rp180.935.250,00 dan Keputusan Sesmenko Perekonomian Nomor 35 Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 senilai Rp177.288.000,00, serta reklasifikasi aset peralatan mesin dan aset tetap lainnya yang sudah tidak digunakan hasil dari usulan jurnal koreksi BPK masing-masing senilai Rp431.307.004,00 dan Rp63.071.925,00. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, terdiri atas:

Tabel 25
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	9.646.100.004	155.163.260
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		358.163.250
Jumlah		9.646.100.004	513.326.510

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Lain-lain
Rp22.859.060.873*

C.3.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar minus Rp22.859.060.873,00 dan Rp10.954.468.808,00.

Tabel 26
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	14.797.735.942	12.387.309.867	2.410.426.075
2	Lisensi	2.253.187.500	1.024.453.125	1.228.734.375
Jumlah A. Aset Tak Berwujud		17.050.923.442	13.411.762.992	3.639.160.450
B	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
1	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		-	-	-
C	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	9.646.100.004	9.447.297.881	198.802.123
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan			0
Jumlah B. Aset Lainnya		9.646.100.004	9.447.297.881	198.802.123
D	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			
1	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			-
Aset Lainnya Yang Belum Diregister		-	-	-
Total		26.697.023.446	22.859.060.873	3.837.962.573

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp5.102.000.765*

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.102.000.765,00 dan Rp4.834.675.558,00 yang merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Mutasi saldo kewajiban jangka pendek diantaranya terdapat sisa UP/TUP dan utang pajak yang belum disetor pada tanggal pelaporan dan kenaikan saldo utang kepada pihak ketiga.

C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

*Utang Kepada
Pihak ketiga
Rp5.099.815.438*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.099.815.438 dan Rp4.606.249.808,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 27
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga (Dalam Rupiah)

Uraian Akun	Saldo	Keterangan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	5.081.928.419	Pembayaran Tukin Desember 2020, Uang Makan CPNS, dan Kekurangan Gaji TA 2020
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	17.887.019	Pembayaran tagihan telepon, sewa overtime, listrik dan langganan parkir dibayar 2021
Total	5.099.815.438	-

C.4.2. UANG MUKA DARI KPPN

*Uang Muka Kppn
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp149.980.723,00. Uang Muka KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.4.3. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp2.185.327*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 bersaldo Rp2.185.327,00 sedangkan per 31 Desember 2019 bersaldo Rp78.445.027,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2019 merupakan saldo kas yang berasal dari pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

C.5.EKUITAS

*Ekuitas
Rp21.360.406.552*

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp21.360.406.552,00 dan Rp44.904.967.550,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp299.900*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp299.900,00. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pemotongan Belanja Pegawai dengan rincian di bawah ini:

Tabel 28
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik/Turun	Naik/Turun
				%
Pendapatan PNBPA Lainnya				
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-		-	
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	299.900	158.324.460	(158.024.560)	
- Pendapatan Anggaran Lain Lain				
Jumlah	299.900	158.324.460	(158.024.560)	(99,81%)

D.2. BEBAN PEGAWAI

*Beban Pegawai
Rp97.588.418.163*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp97.588.418.163,00 dan Rp104.413.513.563,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah Beban Pegawai mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 dikarenakan adanya dampak dari pandemi COVID-19 sehingga kebijakan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 hanya melingkupi gaji induk tanpa Tunjangan Kinerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Pegawai Eselon III kebawah.

Tabel 29
Rincian Beban Pegawai (Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	22.826.003.940	21.565.152.090	1.260.851.850	5,85%
Beban Pembulatan Gaji PNS	337.173	399.160	(61.987)	-15,53%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.317.756.814	1.281.377.678	36.379.136	2,84%
Beban Tunj. Anak PNS	353.163.926	341.230.839	11.933.087	3,50%
Beban Tunj. Struktural PNS	4.617.075.000	4.853.290.000	(236.215.000)	-4,87%
Beban Fungsional PNS	432.920.000	284.510.000	148.410.000	52,16%
Beban Tunj. PPh PNS	200.541.963	243.461.201	(42.919.238)	-17,63%
Beban Tunj. Beras PNS	997.440.660	984.667.140	12.773.520	1,30%
Beban Uang Makan PNS	4.430.429.950	3.914.686.000	515.743.950	13,17%
Beban Tunjangan Umum PNS	687.285.000	739.555.000	(52.270.000)	-7,07%
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	227.500.000	105.000.000	122.500.000	100,00%
Beban Uang Lembur	113.520.000	204.235.000	(90.715.000)	-44,42%
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	61.436.963.143	69.931.697.229	(8.494.734.086)	-12,15%
Pengembalian Beban Pegawai	(52.519.406)	(35.747.774)	(16.771.632)	46,92%
Jumlah	97.588.418.163	104.413.513.563	-6.825.095.400	-6,54%

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp5.274.974.005

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.274.974.005,00 dan Rp4.831.332.513,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode Tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Beban Persediaan (Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik / (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	4.096.242.387	4.674.384.332	(578.141.945)	(12,37%)
Beban Persediaan Lainnya	1.178.731.618	156.948.181	1.021.783.437	651,03%
Beban Persediaan Bahan Baku				
Jumlah Beban Persediaan	5.274.974.005	4.831.332.513	443.641.492	9,18%

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan
Jasa
Rp335.984.893.432

Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp335.984.893.432,00 dan Rp491.348.336.815,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Barang dan Jasa (Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	5.680.350.029	6.304.549.328	(624.199.299)	(9,90%)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10.454.400	-	10.454.400	100%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	29.633.800	31.461.428	(1.827.628)	(5,81%)
Beban Operasional Satker	1.486.270.000	1.586.230.000	(99.960.000)	(6,30%)
Beban Barang Operasional lainnya	2.176.112.732	1.907.039.835	269.072.897	14,11%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid	1.709.689.296	-	1.709.689.296	100%
Beban Bahan	11.664.505.090	21.897.897.604	(10.233.392.514)	(46,73%)
Beban Honor Output Kegiatan	7.914.011.500	19.226.268.606	(11.312.257.106)	(58,84%)
Beban Barang Non Operasional	637.946.000	2.196.830.309	(1.558.884.309)	(70,96%)
Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi	3.726.673.852	-	3.726.673.852	100%
Beban Langganan Listrik	726.458.260	599.984.421	126.473.839	21,08%
Beban Langganan Telepon	91.495.888	171.251.703	(79.755.815)	(46,57%)
Beban Langganan Air		17.025.532	(17.025.532)	(100,00%)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5.670.040.079	3.816.531.699	1.853.508.380	48,57%
Beban Jasa Konsultan	15.199.496.659	32.885.249.419	(17.685.752.760)	(53,78%)
Beban Sewa	51.689.585.213	45.762.317.606	5.927.267.607	12,95%
Beban Jasa Profesi	5.242.217.072	6.735.596.460	(1.493.379.388)	(22,17%)
Beban Jasa Lainnya	219.745.892.810	348.238.739.200	(128.492.846.390)	(36,90%)
Beban Aset Ekstrakomtabel	14.513.000	-	14.513.000	100%
Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid 19	2.586.065.252	-	2.586.065.252	100%
Pengembalian Beban Barang & Jasa	(16.517.500)	(28.636.335)	12.118.835	(42,32%)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	335.984.893.432	491.348.336.815	(155.363.443.383)	(31,62%)

Beban khusus penanganan pandemi Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.022.428.400,00 yang terdiri dari Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp1.709.689.296,00, Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp3.726.673.852,00 dan Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp2.586.065.252,00. Rincian beban khusus penanganan pandemi Covid-19 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Barang Jasa Penanganan Pandemi (Dalam Rupiah)

No	Beban	Jumlah	Keterangan
1	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	1.709.689.296	
	Biaya Komunikasi, pengadaan masker/hand sanitizer, lisensi aplikasi video conference		
2	Beban barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	3.726.673.852	
	Biaya Konsumsi WFO, uang saku RDK WFO, Pengadaan APD		
3	Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	2.586.065.252	Terdapat reklasifikasi penggunaan akun 521119 ke akun 522192 dalam rangka pengadaan jasa swab Covid-19 sebesar Rp49.500.000
	Jasa Penanganan Covid 19 dan honor narasumber melalui video conference		
Jumlah		8.022.428.400	

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

*Beban
Pemeliharaan
Rp17.887.163.923*

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp17.887.163.923,00 dan Rp13.644.270.039,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Beban Pemeliharaan (Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.986.743.963	10.245.527.729	4.741.216.234	46,28%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.556.263.197	2.974.529.586	(418.266.389)	(14,06%)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	344.156.763	424.212.724	(80.055.961)	(18,87%)
Jumlah	17.887.163.923	13.644.270.039	4.242.893.884	31,10%

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp77.380.028.857*

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp77.380.028.857,00 dan Rp111.766.324.555,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas pada Tahun 2020 dikarenakan adanya dampak dari pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan menjadi tertunda untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19. Rincian Beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Perjalanan Dinas

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	11.166.155.567	22.666.319.934	(11.500.164.367)	(50,74%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	372.855.000	1017.473.000	(644.618.000)	(63,35%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.179.406.086	27.933.024.132	(5.753.618.046)	(20,60%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41576.515.578	44.659.346.748	(3.082.831.170)	(6,90%)
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	981237.509	1071889.348	(90.651839)	(8,46%)
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	1683.897.877	15.007.774.075	(13.323.876.198)	(88,78%)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(580.038.760)	(589.502.682)	9.463.922	(161%)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	77.380.028.857	111.766.324.555	(34.386.295.698)	(30,77%)

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp10.774.670.047

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.774.670.047,00 dan Rp11.088.933.831,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.703.845.942	6.610.938.028	1.092.907.914	16,53%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		7.118.350.038	(7.118.350.038)	(100,00%)
Beban Penyusutan Jaringan	29.306.674		29.306.674	100,00%
Beban Amortisasi Software	2.767.952.382	3.501.496.624	(733.544.242)	(20,95%)
Beban Amortisasi Lisensi	225.318.750	225.318.750	-	0,00%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan		30.699.126	(30.699.126)	(100,00%)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	48.246.299	8.646.265	39.600.034	458,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.774.670.047	11.088.933.831	(314.263.784)	(2,83%)

D.8. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban

Tertagih
(Rp460.419)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp460.419,00) dan (Rp227.872,00). Saldo atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terjadi atas penyesuaian atas saldo pada akun penyisihan piutang tak tertagih periode berjalan dengan periode sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-	
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(460.419)	(227.872)	(232.547)	
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(460.419)	(227.872)	(232.547)	102,05%

D.9. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional
Rp198.769.167

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2020 sebesar Rp198.769.167,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun)	%
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional				
- Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	114.751.527	(17.640.210)	132.391.737	(750,51%)
# Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	130.101.089	11.505.555	118.595.534	1030,77%
# Beban Pelepasan Aset Non Lancar	15.349.562	29.145.765	(13.796.203)	(47,34%)
- Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	84.017.640	76.726.915	7.290.725	9,50%
# Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	187.351.423	208.407.613	(21.056.190)	(10,10%)
a. Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	4.452.990	9.750.000	(5.297.010)	(54,33%)
b. Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL	14.478.800	10.962.723	3.516.077	32,07%
c. Penerimaan Kembali Modal TAYL	-	-	-	
d. Pendapat Penyesuaian Nilai Persediaan	160.694.633	186.170.640	(25.476.007)	(13,68%)
e. Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi	7.725.000	-	7.725.000	
f. Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR	-	1.524.250	(1.524.250)	(100,00%)
# Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	103.333.783	131.680.698	(28.346.915)	(21,53%)
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	198.769.167	59.086.705	139.682.462	236,40%

Surplus dari pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya berupa hasil lelang atas barang milik negara yang telah dihentikan dari operasional pemerintahan sebesar

Rp130.101.089,00. Sedangkan untuk Beban Pelepasan Aset non Lancar merupakan kerugian atas hasil penghapusan BMN Aset tak berwujud sebesar Rp15.349.562,00. Adapun surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya diperoleh dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, pendapatan perolehan Aset Lainnya dan pendapatan/beban dari penyesuaian nilai persediaan. Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu merupakan setoran atas belanja Tahun 2019 yaitu atas Belanja Pegawai sebesar Rp4.452.990,00, Belanja Barang Rp14.478.800,00, yang disetorkan pada tahun 2020. Pendapatan penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp160.694.633,00, dan Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi atas Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp7.725.000,00. Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya Rp103.333.783,00 yang berasal dari beban penyesuaian nilai persediaan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp44.904.967.550

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp44.904.967.550,00 dan Rp40.030.783.559,00.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit) LO
Rp(544.690.618.941)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar Rp(544.690.618.941,00) dan (Rp741.360.231.996,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan Akuntansi
Rp0

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada 31 Desember 2020 dan tahun 2019.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS

E.4.1. SELISIH REVALUASI ASET

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

Saldo Revaluasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah bersaldo Rp0. Adapun pada 31 Desember 2019 bersaldo Rp10.155.373.653. Koreksi Tahun 2019 berasal dari adanya Revaluasi atas Gedung dan Bangunan yang sudah diserahterimakan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020.

E.4.2. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi (Rp0)

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah bersaldo Rp0. Adapun pada 31 Desember 2019 bersaldo (Rp1.903.194.155,00).

E.4.3. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi lain-lain Rp0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 bersaldo nihil dan 31 Desember 2019 bersaldo nihil.

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi Antar
Entitas
Rp521.146.057.943*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp521.146.057.943,00 dan Rp737.982.236.489,00. Terdapat pengesahan hibah langsung atas kegiatan Prospera periode ke 2 sebesar Rp141.911.292.772,00. Transfer masuk merupakan transfer berupa peralatan dan mesin serta jaringan dari Kementerian Keuangan dengan nilai buku aset sebesar Rp1.465.333.700,00. Transfer Keluar merupakan transfer aset berupa Gedung dan Bangunan berdasarkan nilai buku aset sebesar Rp27.761.566.480,00 dan peralatan mesin dengan nilai buku aset sebesar Rp318.660.681,00 dari Kemenko Perekonomian kepada Mahkamah Konstitusi. Rincian Transaksi antar Entitas s.d. 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 38
Rincian Nilai Transaksi antar Entitas (Dalam Rupiah)

Jenis Beban	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(264.677.956)
Ditagikan ke Entitas Lain	406.114.336.588
Pengesahan Hibah Langsung	141.911.292.772
Transfer Masuk	1.465.333.700
Transfer Keluar	(28.080.227.161)
Jumlah	521.146.057.943

E.6. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp21.360.406.552*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp21.360.406.552,00 dan Rp44.904.967.550,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN, yaitu:

- Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) mengelola rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 1030098879881, yang bersaldo sebesar Rp0 per tanggal 31 Desember 2020.
- Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) mengelola rekening pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 0507.01.000148.30.7 yang bersaldo sebesar Rp0 per tanggal 31 Desember 2020.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA

Terhadap barang inventaris yang tidak dapat digunakan kembali, telah disampaikan usulan permohonan lelang BMN barang inventaris kepada Kepala KPKNL Jakarta I. Pendapatan atas lelang tersebut kemudian dituangkan dalam salinan risalah lelang Nomor 47/25/2020 tanggal 3 Februari 2020, dengan nilai lelang barang terjual sebesar Rp42.100.090,00 dan risalah lelang nomor 441/25/2020 tanggal 25 November 2020 dengan nilai lelang barang terjual sebesar Rp88.000.999,00.

F.2.2. TRANSFER KELUAR

Terdapat transfer keluar berupa Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang telah dilakukan serah terima oleh Kemenko Perekonomian kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2020 sesuai BAST nomor: 1/SES.M.EKON/02/2020. Selain itu terdapat transfer keluar berupa Aset Tak Berwujud berupa Website EITI yang telah dilakukan serah terima oleh Kemenko Perekonomian kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 7 Desember 2020 sesuai BAST nomor: 2/SES.M.EKON/12/2020.

F.2.3. TRANSFER MASUK

Terdapat transfer masuk dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan berupa Peralatan Mesin dan Jaringan dengan nilai total sebesar Rp5.895.197.621,00 sesuai BAST nomor BA-10.1/MK.1/SJ.7/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan transfer masuk dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berupa peralatan dan mesin sebesar Rp394.207.000,00 sesuai BAST nomor BA-2/MK.1/SJ.8/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

F.2.4. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat revisi yang dilakukan atas DIPA Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA.035) yaitu pada:

- Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427752/2020R sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan tanggal revisi terakhir 23 Desember 2020 dengan besaran pagu sebesar Rp404.746.092.000,00.
- Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah melakukan 6 (enam) kali revisi DIPA, dengan tanggal revisi terakhir tanggal 23 Desember 2020 dan besaran pagu sebesar Rp16.349.456.000,00.

F.2.5. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI

Pada tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima hibah langsung antara lain:

a. HIBAH PROSPERA

Hibah tersebut berdasarkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam Subsidiary Arrangement (SA) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tanggal 4 Desember 2017, dengan masa perjanjian oleh kedua belah pihak untuk periode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2023. Hibah dari pemerintah Australia tersebut teregister di Kementerian Keuangan dengan nomor 23TSV7CA dengan total alokasi nilai hibah sebesar AUD 145.000.000 (Pagu Indikatif) yang dilaksanakan oleh 26 (dua puluh enam) Kementerian/Lembaga. Kegiatan hibah yang dibiayai dari pemerintah Australia dilaksanakan melalui proyek Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA).

Pagu indikatif PROSPERA yang dibiayai dari hibah pemerintah Australia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebesar AUD 53.594.600. Realisasi kegiatan hibah untuk tahun 2019 sebesar Rp76.836.389.526,00, dan untuk kegiatan Tahun 2020 telah dilakukan serah terima dengan nomor BAST BA-8/SET.M.EKON.3/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 dengan nilai realisasi sebesar Rp141.911.292.772,00.

Jakarta, 30 April 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Airlangga Hartarto

LAMPIRAN PENDUKUNG

**Lampiran III. Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2020**

No.	Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/ Kantor Pos	Kode Rekening	Surat Izin		Saldo	Ket
						Nomor	Tanggal		
1	427752	1030098879881	BPG 019 Menko Perekonomian	Bank Mandiri KCP. Depkeu	20	2359/WPb.12/ KP.0204/2019	02 Mei 2019	Rp0	
2	427755	0507-01-000148-30-7	BPG 019 BA 69 Menko Perekonomian	Bank Rakyat Indonesia KCP. Depkeu	20	1104/WPb.12/ KP.0230/2015	23 Maret 2015	Rp0	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 26/04/21 8:57 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	264,677,956	(264,677,956)	0	0	973,148,509	(973,148,509)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	264,677,956	(264,677,956)	0	0	973,148,509	(973,148,509)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	98,009,048,000	97,072,256,965	936,791,035	99	105,020,531,000	104,020,300,613	1,000,230,387	99
	BELANJA BARANG	309,169,926,000	295,345,903,008	13,824,022,992	96	318,925,863,000	314,636,547,474	4,289,315,526	99
	BELANJA MODAL	13,916,574,000	13,696,176,615	220,397,385	98	9,764,468,000	9,044,150,735	720,317,265	93
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	421,095,548,000	406,114,336,588	14,981,211,412	96	433,710,862,000	427,700,998,822	6,009,863,178	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 25/04/21 9:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	299,900	158,324,460	(158,024,560)	(99.811)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	299,900	158,324,460	(158,024,560)	(99.811)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	299,900	158,324,460	(158,024,560)	(99.811)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	97,588,418,163	104,413,513,563	(6,825,095,400)	(6.537)
Beban Persediaan	5,274,974,005	4,831,332,513	443,641,492	9.183
Beban Barang dan Jasa	335,984,893,432	491,348,336,815	(155,363,443,383)	(31.62)
Beban Pemeliharaan	17,887,163,923	13,644,270,039	4,242,893,884	31.097
Beban Perjalanan Dinas	77,380,028,857	111,766,324,555	(34,386,295,698)	(30.766)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	4,485,159,717	(4,485,159,717)	(100)
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 25/04/21 9:44 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10,774,670,047	11,088,933,831	(314,263,784)	(2.834)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(460,419)	(227,872)	(232,547)	102.052
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	544,889,688,008	741,577,643,161	(196,687,955,153)	(26.523)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(544,889,388,108)	(741,419,318,701)	196,529,930,593	(26.507)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	114,751,527	(17,640,210)	132,391,737	(750.511)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	130,101,089	11,505,555	118,595,534	1,030.768
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	15,349,562	29,145,765	(13,796,203)	(47.335)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	84,017,640	76,726,915	7,290,725	9.502
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	187,351,423	208,407,613	(21,056,190)	(10.103)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	103,333,783	131,680,698	(28,346,915)	(21.527)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	198,769,167	59,086,705	139,682,462	236.403
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(544,690,618,941)	(741,360,231,996)	196,669,613,055	(26.528)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(544,690,618,941)	(741,360,231,996)	196,669,613,055	(26.528)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 26/04/21 8:57 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	44,904,967,550	40,030,783,559	4,874,183,991	12.176
SURPLUS/DEFISIT-LO	(544,690,618,941)	(741,360,231,996)	196,669,613,055	(26.528)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	8,252,179,498	(8,252,179,498)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	10,155,373,653	(10,155,373,653)	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(1,903,194,155)	1,903,194,155	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	521,146,057,943	737,982,236,489	(216,836,178,546)	(29.382)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(23,544,560,998)	4,874,183,991	(28,418,744,989)	(583.046)
EKUITAS AKHIR	21,360,406,552	44,904,967,550	(23,544,560,998)	(52.432)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 9:44 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	149,980,723	(149,980,723)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	78,359,727	93,422,527	(15,062,800)	(16.12)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	35,646,813	0	35,646,813	0.00
Piutang Bukan Pajak	558,674	138,642,677	(138,084,003)	(99.60)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2,793)	(693,212)	690,419	(99.60)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	555,881	137,949,465	(137,393,584)	(99.60)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	46,000,000	0	46,000,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(230,000)	0	(230,000)	0.00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	45,770,000	0	45,770,000	0.00
Persediaan	588,388,582	439,174,124	149,214,458	33.98
JUMLAH ASET LANCAR	748,721,003	820,526,839	(71,805,836)	(8.75)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	78,465,371,778	73,866,781,172	4,598,590,606	6.23
Gedung dan Bangunan	0	29,541,154,075	(29,541,154,075)	(100.00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,078,674,827	0	2,078,674,827	0.00
Aset Tetap Lainnya	842,598,787	464,570,712	378,028,075	81.37
AKUMULASI PENYUSUTAN	(59,510,921,651)	(59,618,390,434)	107,468,783	(0.18)
JUMLAH ASET TETAP	21,875,723,741	44,254,115,525	(22,378,391,784)	(50.57)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	17,050,923,442	15,106,143,042	1,944,780,400	12.87
Aset Lain-lain	9,646,100,004	513,326,510	9,132,773,494	1,779.14
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(22,859,060,873)	(10,954,468,808)	(11,904,592,065)	108.67
JUMLAH ASET LAINNYA	3,837,962,573	4,665,000,744	(827,038,171)	(17.73)
JUMLAH ASET	26,462,407,317	49,739,643,108	(23,277,235,791)	(46.80)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,099,815,438	4,606,249,808	493,565,630	10.72
Uang Muka dari KPPN	0	149,980,723	(149,980,723)	(100.00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	2,185,327	78,445,027	(76,259,700)	(97.21)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,102,000,765	4,834,675,558	267,325,207	5.53
JUMLAH KEWAJIBAN	5,102,000,765	4,834,675,558	267,325,207	5.53
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	21,360,406,552	44,904,967,550	(23,544,560,998)	(52.43)
JUMLAH EKUITAS	21,360,406,552	44,904,967,550	(23,544,560,998)	(52.43)
JUMLAH EKUITAS	21,360,406,552	44,904,967,550	(23,544,560,998)	(52.43)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26,462,407,317	49,739,643,108	(23,277,235,791)	(46.80)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 9:44 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	78,359,727	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	35,646,813	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	558,674	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	46,000,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	2,793
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	230,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	345,222,870	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	69,889,694	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	173,276,018	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	78,465,371,778	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	0	0
0.0	134113	Jaringan	2,078,674,827	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	391,600,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	450,998,787	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	58,868,273,850
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	642,647,801
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	0	0
0.0	162151	Software	14,797,735,942	0
0.0	162161	Lisensi	2,253,187,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	9,646,100,004	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	9,447,297,881
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	12,387,309,867
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	1,024,453,125
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	0
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	5,081,928,419
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	17,887,019
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	2,185,327
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	406,114,336,588
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	264,677,956	0
0.0	313211	Transfer Keluar	28,080,227,161	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 9:44 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,465,333,700
0.0	391111	Ekuitas	0	44,904,967,550
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	141,911,292,772
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	130,101,089
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	7,725,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	299,900
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	4,452,990
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	14,478,800
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	160,694,633
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	22,826,003,940	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	9,357,250
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	337,173	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	188,208
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,317,756,814	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,301,632
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	353,163,926	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	660,326
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,617,075,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	12,609,900
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	432,920,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	3,815,700
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	200,541,963	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	997,440,660	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,430,429,950	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	2,138,000
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	687,285,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	1,100,000
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	227,500,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	113,520,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	61,436,963,143	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	19,348,390
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	5,680,350,029	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10,454,400	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	29,633,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,486,270,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,176,112,732	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	1,709,689,296	0
3.0	521211	Beban Bahan	11,664,505,090	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	7,914,011,500	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	13,937,500
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	637,946,000	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	3,726,673,852	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 9:44 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	726,458,260	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	91,495,888	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,670,040,079	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	15,199,496,659	0
3.0	522141	Beban Sewa	51,689,585,213	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	5,242,217,072	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	1,800,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	219,745,892,810	0
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	780,000
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,586,065,252	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,986,743,963	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,556,263,197	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	11,166,155,567	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	1,774,800
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	372,855,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,179,406,086	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	737,500
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41,576,515,578	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	556,381,460
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	981,237,509	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,683,897,877	0
3.1	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	21,145,000
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,703,845,942	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	29,306,674	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	2,767,952,382	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	225,318,750	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	48,246,299	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,096,242,387	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	344,156,763	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	1,178,731,618	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	103,333,783	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	460,419
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	14,513,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	15,349,562	0
JUMLAH			682,835,435,189	682,835,435,189

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 11:49 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	14,981,211,412	0
0.0	115631	Piutang dari BLU	0	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	264,677,956	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	22,781,948,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	430,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,345,402,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	378,406,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	4,699,930,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	450,920,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	230,853,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,000,500,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	4,562,680,000
2.0	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	0
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	704,204,000
2.0	511512	Allotment Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	227,500,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	130,000,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	61,496,275,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	6,012,081,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	20,000,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	44,681,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,513,540,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	2,541,560,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan	0	2,011,868,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	12,943,178,000
2.0	521212	Allotment Belanja Barang Transito	0	0
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	8,129,162,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	641,873,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	0	3,840,757,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	4,517,197,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	300,000,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan	0	1,462,287,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	836,712,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	108,978,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	9,600,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	5,704,290,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	15,536,225,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	52,241,514,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	5,506,089,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	79,811,800,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,775,121,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	15,855,499,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,915,215,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 11:49 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	0	13,500,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	12,603,067,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	441,292,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	23,287,569,000
2.0	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	0
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	44,749,071,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	1,058,444,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	1,737,756,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	11,930,898,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	0
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	1,985,676,000
2.0	537112	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	130,101,089
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	7,725,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	299,900
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	4,452,990
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	122,098,977
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	22,706,121,840	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	9,357,250
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	337,173	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	188,208
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,317,756,814	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,301,632
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	353,163,926	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	660,326
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,615,995,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	12,609,900
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	432,920,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3,815,700
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	200,541,963	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	997,440,660	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,399,041,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	2,138,000
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	687,285,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,100,000
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	227,500,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	113,520,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	61,073,152,995	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	19,348,390
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,680,350,029	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,454,400	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	29,633,800	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 11:49 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,486,270,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,225,612,732	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	1,745,336,109	0
3.0	521211	Belanja Bahan	11,664,505,090	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	7,937,976,500	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	13,937,500
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	637,946,000	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	3,726,673,852	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,352,992,655	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	158,220,733	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	1,199,770,988	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	744,234,978	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	95,043,030	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,667,005,127	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	15,199,496,659	0
3.0	522141	Belanja Sewa	51,693,891,873	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,261,717,072	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	1,800,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	77,835,158,712	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	780,000
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,536,565,252	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,484,543,463	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,562,783,197	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	13,500,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	11,166,155,567	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	1,774,800
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	372,855,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,185,006,086	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	737,500
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41,603,624,978	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	556,381,460
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	981,237,509	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,683,897,877	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	21,145,000
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,713,396,215	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	1,982,780,400	0
JUMLAH			422,009,301,622	422,009,301,622

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dalam Rupiah)

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 26/04/21 11:02
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	24,181,948,000	22,781,948,000	22,706,121,840	9,357,250	22,696,764,590	99.67	85,183,410
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	430,000	430,000	337,173	188,208	148,965	78.41	281,035
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,545,402,000	1,345,402,000	1,317,756,814	3,301,632	1,314,455,182	97.95	30,946,818
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	428,406,000	378,406,000	353,163,926	660,326	352,503,600	93.33	25,902,400
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5,599,930,000	4,699,930,000	4,615,995,000	12,609,900	4,603,385,100	98.21	96,544,900
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	500,920,000	450,920,000	432,920,000	3,815,700	429,104,300	96.01	21,815,700
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	527,510,000	230,853,000	200,541,963	0	200,541,963	86.87	30,311,037
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,400,500,000	1,000,500,000	997,440,660	0	997,440,660	99.69	3,059,340
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,664,223,000	4,562,680,000	4,399,041,000	2,138,000	4,396,903,000	96.41	165,777,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	50,000,000	0	0	0	0		0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	704,204,000	704,204,000	687,285,000	1,100,000	686,185,000	97.6	18,019,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	40,603,473,000	36,155,273,000	35,710,603,376	33,171,016	35,677,432,360	98.77	477,840,640
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	157,500,000	227,500,000	227,500,000	0	227,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	157,500,000	227,500,000	227,500,000	0	227,500,000	100	0
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	280,000,000	130,000,000	113,520,000	0	113,520,000	87.32	16,480,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	280,000,000	130,000,000	113,520,000	0	113,520,000	87.32	16,480,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	74,968,075,000	61,496,275,000	61,073,152,995	19,348,390	61,053,804,605	99.31	442,470,395
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	74,968,075,000	61,496,275,000	61,073,152,995	19,348,390	61,053,804,605	99.31	442,470,395
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	116,009,048,000	98,009,048,000	97,124,776,371	52,519,406	97,072,256,965	99.1	936,791,035
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,416,535,000	6,012,081,000	5,680,350,029	0	5,680,350,029	94.48	331,730,971
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	20,000,000	10,454,400	0	10,454,400	52.27	9,545,600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	75,500,000	44,681,000	29,633,800	0	29,633,800	66.32	15,047,200
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,488,020,000	1,513,540,000	1,486,270,000	0	1,486,270,000	98.2	27,270,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,886,260,000	2,541,560,000	2,225,612,732	0	2,225,612,732	87.57	315,947,268
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,011,868,000	1,745,336,109	0	1,745,336,109	86.75	266,531,891
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	8,866,315,000	12,143,730,000	11,177,657,070	0	11,177,657,070	92.04	966,072,930
5212	Belanja Barang Non Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dalam Rupiah)

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 26/04/21 11:02
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	15,114,857,000	12,943,178,000	11,664,505,090	0	11,664,505,090	90.12	1,278,672,910
521212	Belanja Barang Transito	3,000,000,000	0	0	0	0		0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,125,810,000	8,129,162,000	7,937,976,500	13,937,500	7,924,039,000	97.65	205,123,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	799,236,000	641,873,000	637,946,000	0	637,946,000	99.39	3,927,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,840,757,000	3,726,673,852	0	3,726,673,852	97.03	114,083,148
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	30,039,903,000	25,554,970,000	23,967,101,442	13,937,500	23,953,163,942	93.79	1,601,806,058
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,926,940,000	4,517,197,000	4,352,992,655	0	4,352,992,655	96.36	164,204,345
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	168,000,000	300,000,000	158,220,733	0	158,220,733	52.74	141,779,267
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,462,287,000	1,199,770,988	0	1,199,770,988	82.05	262,516,012
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,094,940,000	6,279,484,000	5,710,984,376	0	5,710,984,376	90.95	568,499,624
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	762,000,000	836,712,000	744,234,978	0	744,234,978	88.95	92,477,022
522112	Belanja Langganan Telepon	197,178,000	108,978,000	95,043,030	0	95,043,030	87.21	13,934,970
522113	Belanja Langganan Air	9,600,000	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	7,584,538,000	5,704,290,000	5,667,005,127	0	5,667,005,127	99.35	37,284,873
522131	Belanja Jasa Konsultan	41,855,160,000	15,536,225,000	15,199,496,659	0	15,199,496,659	97.83	336,728,341
522141	Belanja Sewa	49,736,958,000	52,241,514,000	51,693,891,873	0	51,693,891,873	98.95	547,622,127
522151	Belanja Jasa Profesi	7,338,100,000	5,506,089,000	5,261,717,072	1,800,000	5,259,917,072	95.56	246,171,928
522191	Belanja Jasa Lainnya	25,084,281,000	79,811,800,000	77,835,158,712	780,000	77,834,378,712	97.52	1,977,421,288
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,775,121,000	2,536,565,252	0	2,536,565,252	91.4	238,555,748
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	132,567,815,000	162,530,329,000	159,033,112,703	2,580,000	159,030,532,703	97.85	3,499,796,297
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,041,000,000	15,855,499,000	15,484,543,463	0	15,484,543,463	97.66	370,955,537
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,400,400,000	2,915,215,000	2,562,783,197	0	2,562,783,197	87.91	352,431,803
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18,000,000	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,459,400,000	18,784,214,000	18,060,826,660	0	18,060,826,660	96.15	723,387,340
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	20,873,100,000	12,603,067,000	11,166,155,567	1,774,800	11,164,380,767	88.6	1,438,686,233
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,219,670,000	441,292,000	372,855,000	0	372,855,000	84.49	68,437,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,355,343,000	23,287,569,000	22,185,006,086	737,500	22,184,268,586	95.27	1,103,300,414
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28,866,112,000	44,749,071,000	41,603,624,978	556,381,460	41,047,243,518	92.97	3,701,827,482
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	83,314,225,000	81,080,999,000	75,327,641,631	558,893,760	74,768,747,871	92.9	6,312,251,129
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	750,000,000	1,058,444,000	981,237,509	0	981,237,509	92.71	77,206,491

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dalam Rupiah)

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 26/04/21 11:02
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	20,943,403,000	1,737,756,000	1,683,897,877	21,145,000	1,662,752,877	96.9	75,003,123
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	21,693,403,000	2,796,200,000	2,665,135,386	21,145,000	2,643,990,386	95.31	152,209,614
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	286,036,001,000	309,169,926,000	295,942,459,268	596,556,260	295,345,903,008	95.72	13,824,022,992
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,051,000,000	11,930,898,000	11,713,396,215	0	11,713,396,215	98.18	217,501,785
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	4,051,000,000	11,930,898,000	11,713,396,215	0	11,713,396,215	98.18	217,501,785
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	1,040,000,000	1,985,676,000	1,982,780,400	0	1,982,780,400	99.85	2,895,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	1,040,000,000	1,985,676,000	1,982,780,400	0	1,982,780,400	99.85	2,895,600
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2,221,600,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	2,221,600,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	7,312,600,000	13,916,574,000	13,696,176,615	0	13,696,176,615	98.42	220,397,385
	JUMLAH BELANJA	409,357,649,000	421,095,548,000	406,763,412,254	649,075,666	406,114,336,588	96.6	14,981,211,412

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 25/04/21 11:50
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	130,101,089	0	130,101,089	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	130,101,089	0	130,101,089	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	7,725,000	0	7,725,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	7,725,000	0	7,725,000	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	299,900	0	299,900	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	299,900	0	299,900	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,452,990	0	4,452,990	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	122,098,977	0	122,098,977	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	126,551,967	0	126,551,967	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	264,677,956	0	264,677,956	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	264,677,956	0	264,677,956	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dalam Rupiah)

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 25/04/21 11:50
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,011,868,000	1,745,336,109	0	1,745,336,109	86.75	266,531,891
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	2,011,868,000	1,745,336,109	0	1,745,336,109	86.75	266,531,891
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,840,757,000	3,726,673,852	0	3,726,673,852	97.03	114,083,148
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	3,840,757,000	3,726,673,852	0	3,726,673,852	97.03	114,083,148
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,462,287,000	1,199,770,988	0	1,199,770,988	82.05	262,516,012
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	1,462,287,000	1,199,770,988	0	1,199,770,988	82.05	262,516,012
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,775,121,000	2,536,565,252	0	2,536,565,252	91.4	238,555,748
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	2,775,121,000	2,536,565,252	0	2,536,565,252	91.4	238,555,748
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	10,090,033,000	9,208,346,201	0	9,208,346,201	91.26	881,686,799
	JUMLAH BELANJA	0	10,090,033,000	9,208,346,201	0	9,208,346,201	91.26	881,686,799

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020
 TAHUN ANGGARAN 2020
 (Dalam Rupiah)

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tanggal : 26/04/21 9:05 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	345,222,870
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	69,889,694
117199	Persediaan Lainnya	173,276,018
132111	Peralatan dan Mesin	78,465,371,778
134113	Jaringan	2,078,674,827
135111	Aset Tetap Renovasi	391,600,000
135121	Aset Tetap Lainnya	450,998,787
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(58,868,273,850)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(642,647,801)
162151	Software	14,797,735,942
162161	Lisensi	2,253,187,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	9,646,100,004
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(9,447,297,881)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(12,387,309,867)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(1,024,453,125)
J U M L A H		26,302,074,896

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dalam Rupiah)

Tanggal : 25/04/21 9:52 PM

Halaman : 1

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	9,537	73,866,781,172	666	15,986,332,509	1,008	11,387,741,903	9,195	78,465,371,778
30103	ALAT BANTU	20	640,882,284	12	1,299,095,304	3	584,190,484	29	1,355,787,104
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	63	11,455,743,990	0	0	41	7,089,911,490	22	4,365,832,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	23	48,403,505	0	0	2	4,617,250	21	43,786,255
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	10	24,317,400	0	0	0	0	10	24,317,400
30303	ALAT UKUR	10	61,607,940	1	1,001,000	0	0	11	62,608,940
30501	ALAT KANTOR	1,501	8,996,161,755	106	2,287,499,449	278	1,181,088,556	1,329	10,102,572,648
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,126	19,607,246,389	327	5,980,677,608	591	1,745,866,649	4,862	23,842,057,348
30601	ALAT STUDIO	307	3,476,608,825	73	1,896,557,898	21	161,182,375	359	5,211,984,348
30602	ALAT KOMUNIKASI	536	1,368,451,038	17	21,250,000	9	25,592,630	544	1,364,108,408
30603	PERALATAN PEMANCAR	1	13,004,200	6	58,223,000	0	0	7	71,227,200
30701	ALAT KEDOKTERAN	40	459,789,840	14	139,498,750	0	0	54	599,288,590
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	8	13,956,800	0	0	0	0	8	13,956,800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	9,867,000	0	0	0	0	2	9,867,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	13,358,400	0	0	0	0	1	13,358,400
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	2,510,000	0	0	0	0	1	2,510,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1,157	20,005,913,132	38	805,410,100	38	496,608,405	1,157	20,314,714,827
31002	PERALATAN KOMPUTER	730	7,661,148,674	70	3,471,839,400	25	98,684,064	775	11,034,304,010
31501	ALAT DETEKSI	0	0	1	22,000,000	0	0	1	22,000,000
31503	ALAT SAR	0	0	1	3,280,000	0	0	1	3,280,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	7,810,000	0	0	0	0	1	7,810,000
133111	Gedung dan Bangunan	1	29,541,154,075	0	0	1	29,541,154,075	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	29,541,154,075	0	0	1	29,541,154,075	0	0
134113	Jaringan	0	0	2	2,078,674,827	0	0	2	2,078,674,827
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	0	0	2	2,078,674,827	0	0	2	2,078,674,827
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	2	391,600,000	0	0	2	391,600,000
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	2	391,600,000	0	0	2	391,600,000
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	166	464,570,712	10	49,500,000	165	63,071,925	11	450,998,787
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	90	23,286,300	0	0	90	23,286,300	0	0
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	401,498,787	0	0	0	0	1	401,498,787
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	75	39,785,625	2	28,930,000	75	39,785,625	2	28,930,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	8	20,570,000	0	0	8	20,570,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1	155,163,260	747	9,506,297,244	1	15,360,500	747	9,646,100,004

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dalam Rupiah)

Tanggal : 25/04/21 9:52 PM

Halaman : 2

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	41	7,089,911,490	1	15,360,500	40	7,074,550,990
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	2	4,617,250	0	0	2	4,617,250
30501	ALAT KANTOR	0	0	138	675,412,159	0	0	138	675,412,159
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	308	891,216,946	0	0	308	891,216,946
30601	ALAT STUDIO	0	0	21	161,182,375	0	0	21	161,182,375
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	9	25,592,630	0	0	9	25,592,630
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	38	496,608,405	0	0	38	496,608,405
31002	PERALATAN KOMPUTER	1	155,163,260	25	98,684,064	0	0	26	253,847,324
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	90	23,286,300	0	0	90	23,286,300
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	75	39,785,625	0	0	75	39,785,625
TOTAL			104,027,669,219		28,012,404,580		41,007,328,403		91,032,745,396

DAFTAR KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PER 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

No	Nama Perkiraan	Saldo 31 Desember 2019	Mutasi Piutang 31 Desember 2019	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Penggolongan				Nilai Agunan atau Barang Sitaan
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
A.	PNBP	-	-	-	-				-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-	-				-
	1) Piutang Jangka Pendek								
	a. Piutang Bukan Pajak	-		-	-				-
	b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	-		-	-				-
	2) Piutang Jangka Panjang								
	a. Piutang Jangka Panjang Lainnya								
	b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Lainnya								
B.	Piutang Lainnya	138.642.677	(138.084.003)	558.674	558.674				
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Lainnya	(693.212)	690.419	(2.793)	(2.793)				
C.	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	46.000.000	46.000.000	46.000.000				
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	(230.000)	(230.000)	(230.000)				
	Jumlah Total	138.642.677	(92.084.003)	46.558.674	46.558.674				
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(693.212)	460.419	(232.793)	(232.793)				

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BA 035)
TAHUN 2020
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020 (AUDITED)**

Nomor : NKF-035 / 51 /PB.6/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal 23 April 2021, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA 035) Tahun 2020**, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas **Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA 035) Tahun 2020** dan untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2020 (Audited)**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian** menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara) **paling lambat tanggal 5 Mei 2021**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian (BA 035)



Akhmad Hisyam

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



Tunggal Yuniarto

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny Priano Singawiria

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK


Hartono

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

Kode Dagian Anggaran : 035

Uraian Bagian Anggaran : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(Dalam Rupiah)

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2-5+6	10 = 3-7+8	11 = 9-10
41. Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Pendapatan Negara Bukan Pajak	264.677.956	-	264.677.956	-	-	-	-	264.677.956	-	264.677.956
421. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422. Pendapatan dari KND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425. Pendapatan PNPB Lainnya	264.677.956	-	264.677.956	-	-	-	-	264.677.956	-	264.677.956
424. Pendapatan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	264.677.956	-	264.677.956	-	-	-	-	264.677.956	-	264.677.956

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+6-7	11 = 4+8-9	12 = 10-9
51	Belanja Pegawai	97.124.776.371	52.519.406	97.072.256.965	-	-	-	-	97.124.776.371	52.519.406	97.072.256.965
52	Belanja Barang dan Jasa	295.942.459.268	596.556.260	295.345.903.008	-	-	-	-	295.942.459.268	596.556.260	295.345.903.008
53	Belanja Modal	13.696.176.615	-	13.696.176.615	-	-	-	-	13.696.176.615	-	13.696.176.615
54	Belanja Pembayaran Kewajiban Ut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Belanja Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA		406.763.412.254	649.075.666	406.114.336.588	-	-	-	-	406.763.412.254	649.075.666	406.114.336.588



KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Akhras Daryam



KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

Periando Singawiria

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Hartono

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2020
PER 31 DESEMBER 2020

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : /PB.6/2021
Tanggal : April 2021

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
BA : 035

(Dalam Rupiah)

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED - REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Bendahara Pengeluaran	-					-
Kas di Bendahara Penerimaan	-					-
Kas Lainnya dan Setara kas	78.359.727					78.359.727
Kas pada BLU	-					-
Investasi Jangka Pendek BLU	-					-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	35.646.813				35.646.813
Uang Muka Belanja (prepayment)	-					-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-					-
Piutang Perpajakan	-					-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-					-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	0	0			-
Piutang Bukan Pajak	46.558.674		46.000.000			558.674
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	(232.793)	230.000				(2.793)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	46.325.881	230.000	46.000.000			555.881
Bagian Lancar TPA	-					-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-					-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	0	0			-
Bagian Lancar TP/TGR	-	46.000.000				46.000.000
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	-		230.000			(230.000)
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	46.000.000	230.000			45.770.000
Piutang dari Kegiatan BLU	-					-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-					-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	0	0			-
Persediaan	588.388.582					588.388.582
Jumlah Aset Lancar	713.074.190	81.876.813	46.230.000	-	-	748.721.003
ASET TETAP						
Tanah	-					-
Peralatan dan Mesin	78.896.678.782		431.307.004			78.465.371.778
Gedung dan Bangunan	-					-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.078.674.827					2.078.674.827
Aset Tetap Lainnya	514.070.712	381.600.000	63.071.925			842.598.787
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-					-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(59.166.459.562)	292.185.712				(58.868.273.850)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-					-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(642.647.801)					(642.647.801)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-					-
Jumlah Aset Tetap	21.680.316.958	689.785.712	494.378.929	0	0	21.875.723.741
PIUTANG JANGKA PANJANG						
Tagihan Penjualan Angsuran	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-					-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	0	0			-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-					-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	0	0			-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-					-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	0	0			-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-

(Dalam Rupiah)

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED - REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
ASET LAINNYA						
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-					-
Aset Tak Berwujud	17.050.923.442					17.050.923.442
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	-					-
Dana Penjaminan	-					-
Dana Kelolaan BLU	-					-
Aset Lain-lain	9.151.721.075	494.378.929				9.646.100.004
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ke3	-					-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(9.149.112.169)		298.185.712			(9.447.297.881)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(13.411.762.992)					(13.411.762.992)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	-					-
Jumlah Aset Lainnya	3.641.769.356	494.378.929	298.185.712	-	-	3.837.962.573
JUMLAH ASET	26.035.160.504	1.266.041.454	838.794.641	-	-	26.462.407.317
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Ulang kepada Pihak Ketiga	5.099.815.438					5.099.815.438
Bagian Lancar Ulang Jangka Panjang	-					-
Ulang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-					-
Ulang Jangka Pendek Lainnya	2.185.327					2.185.327
Hibah Yang Belum Disahkan	-					-
Uang Muka dari KPPN	-	0	0			-
Pendapatan Diterima Dimuka	-					-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.102.000.765	-	-	-	-	5.102.000.765
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Ulang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-					-
Ulang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-					-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	5.102.000.765	-	-	-	-	5.102.000.765
EKUITAS	20.933.159.739	-	427.246.813	-	-	21.360.406.552
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	26.035.160.504					26.462.407.317

Jakarta, April 2021
Kementerian/Lembaga:



Ahmad Hisyam

Ditjen Kekayaan Negara



Tunggal Yunianto

Badan Pemeriksa Keuangan

[Signature]

Hartono



Ungun Perbendaharaan

Robriano Singawina

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 Nomor : /PB 62021
 Tanggal : April 2021

LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
 BA : 035

(Dalam Rupiah)

	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED		KOREKSI REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN PERPAJAKAN						
Pendapatan Pajak Penghasilan	-					-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-					-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-					-
Pendapatan Cukai	-					-
Pendapatan Pajak Lainnya	-					-
Pendapatan Bea Masuk	-					-
Pendapatan Bea Keluar	-					-
Pendapatan Pajak Lain-lain	-					-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-					-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK						
Penerimaan Sumber Daya Alam	-					-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-					-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	299.900					299.900
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	299.900					299.900
PENDAPATAN HIBAH						
Pendapatan Hibah	-					-
Jumlah Pendapatan Hibah	-					-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	299.900					299.900
BEBAN OPERASIONAL						
Beban Pegawai	97.588.412.163					97.588.412.163
Beban Persediaan	5.274.974.005					5.274.974.005
Beban Barang dan Jasa	335.020.540.245		35.546.813			335.984.893.432
Beban Pemeliharaan	18.278.763.923		391.680.000			17.887.163.923
Beban Perjalanan Dinas	77.380.028.857					77.380.028.857
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-					-
Beban Bunga	-					-
Beban Subsidi	-					-
Beban Hibah	-					-
Beban Bantuan Sosial	-					-
Beban Transfer	-					-
Beban Lain-lain	-					-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.774.670.047					10.774.670.047
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	460.419					460.419
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	545.316.934.821		427.246.813			544.889.688.008
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	545.316.934.821		427.246.813			544.889.388.108
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR						
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	130.101.029					130.101.029
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	15.349.562					15.349.562
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	114.751.527					114.751.527
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA						
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	187.351.423					187.351.423
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	103.333.783					103.333.783
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	84.017.640					84.017.640
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	198.769.167					198.769.167
POS LUAR BIASA						
Pendapatan Luar Biasa	-					-
Beban Luar Biasa	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	545.117.865.754		427.246.813			544.690.618.941

Jakarta, April 2021
 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Badan Pemeriksa Keuangan

[Signature]
 Hartono



Direksi Pembantu

Deputi I Lorian Singawiria

LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2020
PER 31 DESEMBER 2020

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : /PB.6/2021
Tanggal : April 2021

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
BA : 035

(Dalam Rupiah)

AKUN (Dalam Rupiah)	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED REVAL	ASERSI FINAL
		DEBIT	KREDIT		
EKUITAS AWAL	44.904.967.550				44.904.967.550
SURPLUS/DEFISIT LO	(545.117.865.754)		427.246.813		(544.690.618.941)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS					
Penyesuaian Nilai Aset	-				-
Koreksi Nilai Persediaan	-				-
Selisih Revaluasi Aset	-				-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-				-
Koreksi Atas Reklasifikasi	-				-
Koreksi Lain-lain	-				-
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	-				-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	521.146.057.943	-	-		521.146.057.943
Ditagihkan ke Entitas Lain	406.114.336.588	-			406.114.336.588
Diterima dari Entitas Lain	(264.677.956)				(264.677.956)
Transfer Keluar	(28.080.227.161)				(28.080.227.161)
Transfer Masuk	1.465.333.700				1.465.333.700
Penghasilan Hibah Langsung	141.911.292.772				141.911.292.772
Penghasilan Hibah Langsung TAYL	-				-
Penghasilan Pengembalian Hibah Langsung	-				-
Setoran Surplus BLU	-				-
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	(23.971.807.811)	-	427.246.813		(23.544.560.998)
EKUITAS AKHIR	20.933.159.739	-	427.246.813		21.360.406.552

Jakarta, April 2021
Kementerian/Lembaga

Akhmad Hisyam

Badan Pemeriksa Keuangan

Hartono

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tunggul Yunianto

Direktorat Perbendaharaan

Debby Febriano Singawiria

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat
Kode Pos 10710
Telp : (021) 3522003
Fax : (021) 3511467
Web : www.ekon.go.id

